

ABSTRAK

Julaini Haris ***“Implementasi Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat Antara Mahkamah Agung Dengan Pt Pos Indonesia Nomor 02/Hm.00/Pks/V/2023 Di Pengadilan Agama Labuha Kabupaten Halmahera Selatan”*** Dibimbing Oleh Bapak Jamal Hi.Arsad dan Bapak Imran Ahmad

Pada prakteknya perjanjian kerja sama pengiriman dokumen surat tercatat antara Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia NOMOR 02/HM.00/PKS/V/2023 di Pengadilan Agama Labuha Kabupaten Halmahera Selatan tidak berjalan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Dimana masih banyak terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pihak PT. Pos Indonesia yakni pengiriman dokumen surat tercatat kepada pihak-pihak yang terkait kadang tidak diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam penerapan perjanjian kerja sama pengiriman dokumen surat tercatat antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia No. 02/MH.00/PKS/V/2023 Di Pengadilan Agama Labuha Kab. Halmahera Selatan dan bagaimana upaya untuk menangani kendala yang dihadapi tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kota Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan kepustakaan, kemudian setelah data-data terkumpul dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan perjanjian kerjasama pengiriman dokumen surat tercatat antara Mahkamah Agung dengan PT.Pos Indonesia di Pengadilan Agama Labuha Kabupaten Halmahera Selatan. *Pertama*, kurangnya atau ketidaktahuan pihak petugas Pos terkait dengan syarat-syarat dan prosedur dalam proses pengiriman dokumen surat tercatat. *Kedua*, pengembalian bukti atau dokumen surat tercatat tersebut dikarenakan pihak yang dituju tidak berada di alamat yang dijanjikan atau telah pindah alamat. Upaya untuk menangani kendala yang dihadapi dalam penerapan perjanjian kerja sama pengiriman dokumen surat tercatat antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia Di Pengadilan Agama Labuha Kab. Halmahera Selatan antara lain yaitu, Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pihak PT.Pos terkait dengan prosedur pengiriman dokumen surat tercatat.

ABSTRAC

Julaini Haris "***Implementation of the Cooperation Agreement for Sending Registered Mail Documents Between the Supreme Court and Pt Pos Indonesia Number 02/Hm.00/Pks/V/2023 at the Labuha Religious Court, South Halmahera Regency***" Supervised by Mr. Jamal Hi.Arsad and Mr. Imran Ahmad.

In practice, the cooperation agreement for sending registered mail documents between the Supreme Court and PT. Pos Indonesia NUMBER 02/HM.00/PKS/V/2023 at the Labuha Religious Court, South Halmahera Regency, did not proceed according to the agreement agreed upon by both parties. Where there are still many negligences committed by PT. Pos Indonesia, namely sending registered mail documents to related parties, is sometimes not accepted by the parties concerned.

This research aims to find out what obstacles are faced in implementing the cooperation agreement for sending registered mail documents between the Supreme Court and PT Pos Indonesia No. 02/MH.00/PKS/V/2023 At the Labuha Religious Court, Kab. South Halmahera and how to deal with the obstacles faced, this research uses empirical legal research methods located in Labuha City, South Halmahera Regency. The data sources used in this research are primary data sources and secondary data sources, in this research the author uses data collection methods were interviews, observation and literature, then after the data was collected it was analyzed descriptively qualitatively.

Obstacles faced in implementing the cooperation agreement for sending registered mail documents between the Supreme Court and PT Pos Indonesia at the Labuha Religious Court, South Halmahera Regency. First, there is a lack or ignorance on the part of postal officers regarding the terms and procedures in the process of sending registered mail documents. Second, the return of evidence or registered mail documents is because the intended party is not at the intended address or has changed address. Efforts to address the obstacles faced in implementing the cooperation agreement for sending registered mail documents between the Supreme Court and PT Pos Indonesia at the Labuha Regency Religious Court. South Halmahera includes, among other things, conducting outreach and education to PT. Pos regarding procedures for sending registered mail documents.